

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM
(KAMPUNG BATIK) DI KECAMATAN SUKUN MALANG**

Arining Wibowo¹, Setiabudi Sakaria², Basrin Melamba³

¹Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Waskita Dharma Malang

²³Program Studi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Halu Oleo

Email: ariningwibowo@waskitadharma.ac.id

Email: setiabudi@stiki.ac.id

Email: melambabasrin@uho.ac.id/

Abstrak

Adanya sektor UMKM dapat menciptakan berbagai manfaat bagi daerah diantaranya seperti dapat menghadirkan wirausahaan - wirausahaan yang baru sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, yang pastinya hal tersebut pasti akan menyerap tenaga kerja. Pemerintah Daerah Kota Malang membentuk program kampung binaan UMKM yakni Batik Sukun agar dapat semakin berkembang. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yaitu Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kampung Batik Kecamatan Sukun Kota Malang dengan menggunakan dasar teori peran Pemerintah menurut Siagian (2018). Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dan pembahasan berupa temuan-temuan data yang meliputi 4 faktor utama yaitu antara lain Peran Pemerintah sebagai Stabilisator, Inovator, Modernisator dan juga Pelopor. Pengembangan UMKM di Kecamatan Sukun, Kota Malang telah melaksanakan perannya dengan baik sebagaimana yang telah diukur melalui indikator stabilisator, inovator, modernisator dan juga pelopor. Peran yang ditunjukkan oleh Kecamatan Sukun Kota Malang merupakan upaya untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kampung Batik melalui berbagai kegiatan agar UMKM di Kampung Batik dapat semakin maju, berkembang dan memiliki daya saing yang tinggi.

Kata Kunci: Peran; UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Abstract.

The existence of the MSME sector can create various benefits for the region, such as being able to bring new entrepreneurs so that they can create jobs, which of course will certainly absorb labor. The Local Government of Malang City formed a village program assisted by MSMEs, namely Batik Sukun so that it could further develop. This study uses a qualitative descriptive research approach. The focus of the research is the Role of Local Governments in the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) in Batik Village, Sukun District, Malang City by using the theoretical basis of the role of the Government according to Siagian (2018). Data collection techniques consist of observation, in-depth interviews and documentation. The results and discussion are in the form of data findings covering 4 main factors, namely the Government's Role as a Stabilizer, Innovator, Modernizer and Pioneer. The development of MSMEs in Sukun District, Malang City has carried out its role well as measured by indicators of stabilizers, innovators, modernizers and pioneers. The role shown by the Sukun District, Malang City is an effort to develop MSMEs in Batik Village through

various activities so that MSMEs in Batik Village can be more advanced, develop and have high competitiveness.

Keywords: role; UMKM (Micro, Small and Medium Enterprises)

Pendahuluan

Pembangunan nasional adalah suatu usaha untuk meningkatkan serta memperbaiki seluruh aspek kehidupan masyarakat maupun bangsa dan negara yang sekaligus merupakan sebuah proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara. Pembangunan nasional mencerminkan kehendak untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata, serta dapat mengembangkan kehidupan masyarakat yang maju, demokratis berdasarkan Pancasila (Yorisca, 2020). Salah satu prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan nasional ialah pembangunan dari segi ekonomi. Pembangunan ekonomi pada umumnya dapat dimaknai sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk meningkat dalam jangka yang panjang (Menajang, 2019).

Pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. Berdasarkan pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab serta peran yang sangat besar untuk mengurus urusan pemerintahannya termasuk didalamnya dalam hal pembangunan ekonomi. Salah satu kewajiban yang harus dijalankan Pemerintah Daerah dalam pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan kualitas kehidupan. Pemerintah daerah dalam hal ini dapat memberikan dorongan kepada masyarakatnya dalam berwirausaha. Salah satunya yaitu dalam wujud sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sektor UMKM merupakan kegiatan wirausaha

ekonomi yang bisa dimiliki satu orang maupun kelompok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (Nalini, 2021). Adanya sektor UMKM dapat menciptakan berbagai manfaat bagi daerah diantaranya seperti dapat menghadirkan wirausahaan- wirausahaan yang baru sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan, yang pastinya hal tersebut pasti akan menyerap tenaga kerja (Karimah et al., 2021).

Melihat berbagai manfaat yang akan diberikan oleh UMKM terhadap daerah, maka peran Pemerintah Daerah dalam memberikan dorongan untuk mengembangkan UMKM ini merupakan suatu hal yang perlu dilakukan agar UMKM di daerah dapat semakin berkembang dan berkontribusi dengan baik. Pemerintah Daerah harus bertindak dan berkontribusi secara langsung dalam pengembangan UMKM (Budiyanto & Effendy, 2020). Sehingga bukan hanya sekedar perhatian saja yang diberikan, melainkan juga kontribusi dan bukti nyata yang dibeikan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas dari UMKM melalui berbagai kegiatan pengembangan.

Salah satu Pemerintah daerah yang turut melakukan pengembangan terhadap UMKM adalah Pemerintah Daerah Kota Malang. Bukti nyata keseriusan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam mengembangkan UMKM yang ada di Kota Malang antara lain yaitu Pemerintah Daerah Kota Malang membentuk suatu program kampung binaan yang bermaksud untuk me mudahkan Pemerintah Daerah Kota Malang dalam membimbing serta membina UMKM yang ada di Kota Malang. Dengan dibentuknya program kampung binaan oleh Pemerintah Daerah

Kota Malang ini diharapkan UMKM yang terhimpun dalam program kampung binaan dapat semakin berkembang, maju dan dapat bersaing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.

Salah satu dari kampung binaan tersebut yakni Kampung Batik. Kampung Batik adalah sebuah komunitas yang bergerak di pengrajin batik yang terletak di Kecamatan Sukun, Kota Malang. Besarnya jumlah pendapatan yang diperoleh oleh Kampung Batik setiap tahunnya merupakan bukti keberhasilan pembinaan dari pemerintah Kota Malang. Hal tersebut dikarenakan setiap harinya kampung ini tidak pernah sepi pembeli. Banyaknya konsumen yang selalu membeli dan memesan produk batik dengan jumlah yang tidak sedikit.

Adapun dalam hal ini, peran Pemerintah Daerah Kota Malang khususnya di Kecamatan Sukun, bertanggungjawab menjalankan kebijakan Pemerintah Daerah dalam suatu program kerja untuk mengembangkan serta memberdayakan UMKM yang ada di Kota Malang. Hal tersebut sebagaimana yang terlampir pada Peraturan Walikota Malang Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Malang. Maka dari itu, Pemerintah Kota Malang melalui Pemerintah Kecamatan Sukun berusaha dengan baik untuk dapat memberikan segala bentuk upaya agar Kampung Batik dapat semakin berkembang.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bermaksud untuk menggambarkan dan merangkum berbagai kondisi, berbagai keadaan dan berbagai fenomena di masyarakat (Sari et al, 2021). Fokus penelitian ini ialah Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kampung Batik Kecamatan Sukun Kota Malang dengan menggunakan dasar teori peran Pemerintah menurut Siagian (2018). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2017) yang terdiri dari observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis dengan menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman & Saldana (2014) yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dan pembahasan

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah lembaga ataupun instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan pengembangan pada UMKM di Kampung Batik di Kecamatan Sukun Kota Malang. Pelaku usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengrajin batik Kecamatan Sukun Kota Malang yang berperan sebagai pemeran utama dalam pengembangan UMKM di Kampung Batik di Kecamatan Sukun Kota Malang.

Berikut ini uraian hasil dan pembahasan yang telah dilakukan berupa analisa temuan- temuan data dengan menggunakan landasan teori yang fokus pada sasaran kajian penelitian berdasarkan teori Siagian (2018) yang meliputi 4 faktor utama yaitu antara lain

Peran Pemerintah sebagai Stabilisator, Inovator, Modernisator dan juga Pelopor.

Peran Pemerintah sebagai Stabilisator

Pemerintah mengemukakan bahwa komponen utama yang menentukan suatu usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat bertumbuh dan berkembang efektif adalah dengan adanya bantuan modal. Bantuan modal memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pendapatan para pelaku usaha (Wirawan et al., 2015). Tanpa adanya bantuan modal yang memadai setiap usaha akan mengalami kesulitan dan kesusahan dalam proses pengembangan usaha dalam upaya peningkatan pendapatan. Dengan adanya bantuan modal atau dana tersebutlah UMKM dapat memiliki stabilitas iklim dalam usahanya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah yang memiliki peran selaku stabilisator harus mampu memberikan berbagai bantuan modal kepada para pelaku UMKM. Peran Pemerintah selaku stabilisator menjadi sebuah hal yang penting dalam pengembangan suatu UMKM. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kecamatan Sukun tidak memberikan bantuan modal secara langsung kepada para pelaku UMKM di Kampung Batik. Pemerintah Kecamatan Sukun Kota Malang memang tidak menyediakan dan menganggarkan dana khusus untuk memberikan bantuan modal kepada seluruh UMKM di Kecamatan Sukun termasuk juga untuk UMKM di Kampung Batik. Sebagai stabilisator, Pemerintah Kecamatan Sukun Kota Malang hanya berperan untuk membantu dan menghubungkan para pelaku UMKM di Kampung Batik untuk bisa mendapatkan bantuan modal dari berbagai pihak. Terdapat berbagai bantuan modal yang dapat dibantu oleh Pemerintah

Kecamatan Sukun, yang berupa Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Pemerintah Kecamatan Sukun mempunyai wewenang untuk mengusulkan calon penerima bantuan modal bagi para pelaku UMKM di Kota Malang termasuk UMKM di Kampung Batik. Setelah para pelaku UMKM di Kampung Batik telah melengkapi dan mengumpulkan persyaratan berkasnya kepada Pemerintah Kecamatan Sukun kota Malang, kemudian selanjutnya Pemerintah Kecamatan Sukun mengidentifikasi para pelaku UMKM di Kampung Batik yang telah mendaftar apakah layak untuk mendapatkan bantuan modal ataupun tidak. Setelah identifikasi dilakukan, maka tugas Pemerintah Kecamatan Sukun selanjutnya adalah mengusulkan pelaku UMKM di Kampung Batik tersebut kepada pihak berwenang atau yang berkaitan dengan pemberi bantuan modal tersebut. Proses akhir verifikasi penentuan kelayakan usaha mikro yang berhak menerima bantuan atau tidak dilakukan langsung oleh pihak berwenang atau yang berkaitan dengan pemberi bantuan modal. Pemerintah Kecamatan Sukun hanya membantu dan menghubungkan sebagai lembaga pengusul penerima bantuan modal.

Sebagai stabilisator, pemerintah Kecamatan Sukun juga memberikan pendampingan sosialisasi rutin kepada para pelaku UMKM di Kampung Batik mengenai berbagai jenis-jenis bantuan modal. Pemerintah kecamatan Sukun merasa bahwa pemberian sosialisasi kepada para pelaku UMKM di Kampung Batik mengenai bantuan modal merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah kecamatan Sukun dapat membuat pelaku usaha di Kampung Batik memiliki pemahaman yang luas mengenai berbagai bantuan permodalan yang telah disediakan dan juga

diharapkan pelaku UMKM di Kampung Batik dapat memilih dan memilah dengan bijak bantuan modal manakah yang sesuai dengan kebutuhan usaha mereka.

Peran Pemerintah sebagai Inovator

Memainkan peran selaku inovator, pemerintah daerah sebagai keseluruhan menjadi sumber dalam menciptakan hal-hal baru ataupun juga pendekatan metode-metode baru yang diperlukan untuk upaya "*problem solving*" dan "*action oriented*". Pemerintah Daerah selaku inovator memiliki peran untuk menciptakan dan mengembangkan hal-hal baru pada suatu UMKM agar UMKM dapat semakin berkembang. Peran inovator menjadi peran yang sangat penting untuk menunjang kemajuan dari UMKM. Oleh karena itu, pemerintah kecamatan Sukun selaku inovator harus mampu berinovasi menciptakan berbagai ide-ide baru, gagasan-gagasan cemerlang dan mengembangkannya menjadi lebih berdaya guna dan memiliki nilai manfaat yang tinggi agar Kampung Batik dapat semakin maju dan berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah kecamatan Sukun sebagai inovator selalu berusaha untuk menciptakan suatu hal baru agar Kampung Batik dapat semakin maju dan berkembang dalam segala aspek. Salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan Sukun adalah dengan menciptakan akses atau sistem baru untuk meningkatkan penjualan para pelaku UMKM di Kampung Batik. Akses atau sistem penjualan baru tersebut diberi nama dengan Batik Sukun.

Peran Pemerintah sebagai Modernisator

Pemerintah daerah bertugas untuk menggiring dan mengantarkan masyarakat ke arah yang menuju modernisasi dan turut meninggalkan pemikiran-pemikiran yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan

modern agar masyarakat dapat semakin maju dan berkembang. Pemerintah Kecamatan Sukun harus dapat melakukan suatu hal agar pemikiran-pemikiran para pelaku UMKM dapat terus meningkat dan terus diperbarui sehingga UMKM tidak tertinggal dan dapat terus mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, Pemerintah kecamatan Sukun selaku modernisator perlu melakukan dan memberikan sebuah pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia agar dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta kualitas mutu pelaku UMKM. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah pasal 1 dinyatakan bahwa pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui pemberian bimbingan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah kecamatan Sukun sebagai modernisator selalu memberikan bimbingan pelatihan-pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas serta meningkatkan inovasi dari para pelaku UMKM yang ada di Kampung Batik sehingga dengan adanya peningkatan tersebut Kampung Batik dapat semakin maju, berkembang dan memiliki daya saing yang tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya program bimbingan pelatihan rutin tiap tahunnya bagi para pelaku UMKM di Kampung Batik. Bimbingan pelatihan diberikan dan dihadiri khusus untuk para pelaku UMKM di Kampung Batik. Berbagai bimbingan pelatihan diberikan oleh ahli pembuat batik seperti pelatihan pembuatan batik, fotografi produk, pembuatan laporan keuangan, kewirausahaan dan lain-lain.

Pemerintah Kecamatan Sukun juga mendatangkan langsung tenaga ahli (pelatih) khusus yang berkualifikasi, profesional dan ahli di bidangnya untuk memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM di Kampung batik. Diharapkan dengan mendatangkan pelatih khusus membuat para pelaku UMKM di Kampung Batik bisa mendapatkan ilmu yang benar - benar bermanfaat dan harapannya ilmu tersebut dapat diterapkan dengan benar dalam usahanya.

Peran Pemerintah sebagai Pelopor

Pemerintah kecamatan Sukun mampu menunjukkan contoh - contoh nyata dan mendorong masyarakat untuk mengikuti contoh tersebut melalui tindakan nyata jika memang contoh-contoh tersebut bermanfaat. Sebagai pelopor, Pemerintah kecamatan Sukun memiliki peran yang harus mampu memelopori serta mendorong masyarakat untuk melakukan suatu hal yang dapat memberi dampak positif kepada UMKM tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah kecamatan Sukun yang berperan sebagai pelopor selalu mengadakan program-program pemasaran melalui berbagai promosi produk seperti pameran maupun event-event. Promosi dapat membantu pelaku UMKM di Kampung Batik dalam memperkenalkan dan memasarkan produk batiknya baik dalam maupun luar daerah. Menurut Yahya & Lubis (2017) promosi ini memiliki manfaat yaitu komunikasi, dimana merupakan sarana untuk menarik perhatian dan memberikan informasi yang akhirnya mengarahkan konsumen kepada produk. Hal tersebut memberikan kontribusi nilai tambah kepada konsumen dan juga dapat secara aktif mengajak konsumen membeli produk yang ditawarkan. Dengan diselenggarakannya kegiatan promosi ini

sangat berdampak positif bagi para pelaku UMKM di Kampung Batik.

Kesimpulan

Pengembangan UMKM di Kampung Batik, Pemerintah kecamatan Sukun telah melaksanakan perannya dengan baik sebagaimana yang telah diukur melalui indikator stabilisator, inovator, modernisator dan juga pelopor. Peran yang ditunjukkan oleh pemerintah Kecamatan Sukun Kota Malang merupakan upaya untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kampung Batik melalui berbagai kegiatan agar UMKM di Kampung Batik dapat semakin maju, berkembang dan memiliki daya saing yang tinggi.

Sebagai stabilisator, pemerintah kecamatan Sukun membantu dan menghubungkan para pelaku UMKM di Kampung Batik agar bisa mendapatkan bantuan modal dari berbagai pihak serta pemerintah kecamatan Sukun kota Malang juga memberikan pendampingan sosialisasi terkait jenis - jenis bantuan modal kepada para pelaku usaha yang ada di Kampung Batik. Sebagai inovator, pemerintah kecamatan Sukun kota Malang menciptakan akses atau sistem baru untuk meningkatkan penjualan pelaku UMKM di Kampung Batik. Salah satu akses atau sistem penjualan baru tersebut diberi nama dengan Batik Sukun.

Sebagai modernisator, pemerintah kecamatan Sukun kota Malang memberikan berbagai program bimbingan pelatihan rutin tiap tahunnya bagi para pelaku UMKM di Kampung Batik juga mendatangkan langsung tenaga ahli khusus yang berkualifikasi, profesional ahli di bidangnya untuk memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM di Kampung Batik. Sebagai pelopor, pemerintah kecamatan Sukun kota Malang dengan mengadakan dan juga mendorong para pelaku UMKM di Kampung Batik untuk mengikuti

berbagai program - program promosi seperti pameran, dan event-event. Namun, para pelaku UMKM di Kampung Batik masih jarang mengikuti ajang promosi melalui pameran- pameran.

Miles, M. B., Huberman, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. SAGE Publication

Ucapan terima kasih

Ucapan terimakasih disampaikan kepada berbagai pihak yang sudah mendukung terselesainya pengabdian masyarakat ini, terkhusus kepada pemerintah kecamatan Sukun dan Kampung Batik yang ada di kecamatan Sukun kota Malang

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M. R. (2018). *Analisis Pengaruh Pelatihan, Bantuan Modal, Cara Pengelolaan Usaha Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Permana : *Jurnal Perpajakan, Manajemen dan Akuntansi*, 10(2)
- Budiyanto, A., & Effendy, A. A. (2020). *Analisa kebijakan pemerintah Kota Tangerang Selatan terhadap pemberdayaan Koperasi dan UMKM dan dampaknya terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat*. *Jurnal Mandiri : Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, 4(1)
- Chalim, M. A., Listyowati, P. R., Hanim, L., & Noorman, M. (2022). *Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Koperasi*. *Jurnal Penelitian Hukum*, 01(1)
- Karimah, K., Muhtadi, & Kamali, K. (2021). *Strategi Penanggulangan Pengangguran Melalui Peran Usaha Kecil Menengah Genting*. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(1)
- Menajang, H. (2019). *Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Manado*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 16(4).